

## **Wajah Multikulturalisme Eropa: Ancaman atas Kehidupan Sosial Politik Imigran Muslim di Inggris**

Siswanto

### *Abstract*

*This article describe Europe multiculturalism especially Muslim social life in England. One of important social issues in the country is unharmony relation between British society and Muslim imigrant. This is an irony because European community eventually is based on liberalism which give freedom to citizen and non-discrimination principle. There are few condition which cause discrimination in UK, as follow; social jealous to imigrant in Europe as we known that many imigrant who success in its business or working and there is opinion that imigrant take over job opportunity from indigenous people in Europe and misperception to Islam.*

**Keyword:** *Europe, multiculturalism, imigrant, Muslim*

### **Pendahuluan**

Akibat perjalanan sejarah, Eropa berkembang menjadi masyarakat yang merefleksikan beragam unsur kebudayaan. Hal itu meliputi perpaduan antara sejumlah kebudayaan, yaitu antara lain Latin, Slavia, Jerman, dan Celtic. Selanjutnya, perpaduan unsur kebudayaan atau akulturasi ini dipengaruhi lagi oleh unsur-unsur kebudayaan dan keyakinan Yahudi, Yunani, dan Islam. Kebudayaan Eropa merefleksikan proses dialektika kebudayaan yang berlangsung lama sampai tercapai suatu peradaban tinggi seperti yang dapat disaksikan sekarang. Masih dalam catatan sejarah bahwa 200 sampai 146 tahun Sebelum Masehi masyarakat Romawi sudah berinteraksi dengan masyarakat Mediterania. Ada keyakinan bahwa kejayaan kekaisaran Romawi tidak terlepas dari pengaruh warna kebudayaan Yunani Kuno. Seperti diketahui Romawi sebagai imperium mengadopsi peradaban Yunani kuno, mereka menyerap karya sastra, filsafat, dan pengetahuan yang sudah berkembang pesat di wilayah itu (Breisach, 1990: 50). Dengan demikian, keberhasilan Kekaisaran Romawi meletakkan pilar dan membangun peradaban Eropa karena keberhasilannya berinteraksi dan mengambil hikmah dari peradaban Yunani Kuno yang sudah mapan tersebut.

Berpijak pada fakta-fakta historis di atas, multikulturalisme bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Eropa karena pada masa lalu mereka sudah berinteraksi dengan masyarakat dari beragam kebudayaan dan agama. Mereka bahkan bukan sekedar berinteraksi namun menerimanya sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Dengan kata lain, sikap masyarakat Eropa dimasa lalu terbuka kepada masyarakat luar dan unsur kebudayaannya tanpa ada rasa takut atau curiga.

Namun, permasalahannya mengapa belakangan ini ada sekelompok masyarakat di Eropa yang menolak bahkan anti terhadap kelompok imigran dan kultur yang dibawanya. Mereka berdalih kelompok imigran ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi kebudayaan Eropa. Sikap ini mencengangkan sebagian besar masyarakat Eropa sendiri dan masyarakat internasional. Dalam perkembangannya, keberadaan mereka memang mengkristal sedemikian sehingga Parlemen di sejumlah negara Eropa mewadahi aspirasi mereka ke dalam ideologi konservatif ekstrim. Dalam pengamatan sepintas, memang kehadiran kelompok ini dengan ideologi konservatif ekstrimnya belum mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Eropa.

Fenomena di atas dimaknai sebagai perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku sebagian masyarakat Eropa Barat dalam berinteraksi dengan imigran atau kaum pendatang. Perubahan perilaku sosial ini dipahami sebagai pergeseran tata nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat Eropa Barat dari yang sebelumnya menjunjung multikulturalisme seperti yang dianut oleh nenek moyangnya menuju monokulturalisme. Dalam hal ini, pergeseran terjadi dari pengakuan atas keragaman kultural menjadi eksklusif hanya memberi pengakuan kepada satu kultur saja, yaitu kultur Eropa. Masyarakat Eropa berubah dari yang toleran terhadap kelompok sosial di luar dirinya menuju sikap yang intoleran di dalam interaksi sosial.

Oleh karena itu, multikulturalisme di Eropa Barat belakangan ini dipertanyakan kalau tidak ingin dikatakan digugat oleh sebagian warganya terutama oleh kelompok imigran Muslim. Sikap pemerintah beberapa negara di Eropa dan perilaku sebagian warganya mengindikasikan tidak lagi berpijak pada nilai-nilai multikulturalisme, tetapi telah terjadi pergeseran tata nilai yang berimplikasi pada pergeseran perilaku. Pergeseran perilaku sosial sebagian masyarakat Eropa Barat ini bisa jadi karena disebabkan oleh berbagai faktor baik intenal maupun eksternal.

### **Multikulturalisme dan Tata Nilai Liberal**

Multikulturalisme sebenarnya sangat sejalan dengan nilai-nilai liberalisme yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Eropa Barat. Nilai-nilai itu meliputi demokrasi, nilai-nilai kebebasan untuk berkehendak, persamaan hak di depan

hukum, pengakuan hak-hak individu, dan pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia. Jadi tidak heran, masyarakat Eropa Barat dan Amerika Serikat yang berinduk pada liberalisme kemana-mana selalu mengumandangkan nilai-nilai tersebut.

Seperti tersebut di atas, multikulturalisme merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokrasi. Multikulturalisme hanya bisa berkembang dalam masyarakat yang demokratis. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi itu sendiri yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat diberi izin untuk mengembangkan kebudayaannya tanpa memperoleh hambatan dari manapun, sejauh tidak melanggar hukum. Rakyat memiliki kekuasaan sesuai dengan pernyataan di atas, namun didelegasikan kepada wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan itu diberikan kembali oleh negara kepada rakyat berupa hak-hak warga negara untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaannya.

Disamping itu, multikulturalisme juga dilindungi oleh prinsip-prinsip kebebasan seperti pandangan John Lock bahwa manusia memiliki akal sehat, kebebasan, dan toleransi terhadap perbedaan. (Deliar Noer 1982 dan 1985) Multikulturalisme juga hanya bisa berkembang di dalam tatanan politik yang mengakui prinsip-prinsip kebebasan tersebut. Dengan kata lain, multikulturalisme tidak bisa hidup dalam tatanan politik otoriter atau tatanan sosial politik yang mengingkari keberagaman dalam masyarakat. Multikulturalisme dan otoriterisme secara "kimia politik" sesuatu yang bertentangan. Kedua paham itu tidak mungkin disandingkan atau dikompromikan karena memiliki hakekat yang sangat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya hampir mustahil untuk dapat hidup berdampingan.

Lebih lanjut, multikulturalisme juga sejalan dengan azas persamaan yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh masyarakat Eropa Barat. Sesuatu yang perlu diingat bahwa Revolusi Prancis tahun 1789 mewarisi prinsip persamaan, kebebasan, dan persaudaran. Prinsip-prinsip ini berlaku universal tidak hanya untuk masyarakat Prancis, tetapi juga sudah menjadi suatu gagasan ideal yang diadopsi oleh masyarakat internasional. Ancaman terhadap multikulturalisme di Eropa Barat merupakan pelecehan terhadap gagasan mulia dan diperjuangkan habis-habisan oleh Napoleon Bonaparte dan para pahlawan Revolusi Prancis lainnya yang telah gugur dalam memperjuangkan semboyannya atau keyakinannya tersebut.

Multikulturalisme juga sangat sejalan dengan semangat individualisme. Semangat Individualisme memberi hak pada setiap individu untuk beraktivitas sejauh tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, hak-hak tersebut termasuk didalamnya hak-hak untuk merefleksikan kebudayaan dan keyakinan yang dianutnya. Pengekangan terhadap multikulturalisme sebagai

bentuk pengingkaran terhadap semangat individualisme yang biasanya sangat diagungkan dalam kehidupan sosial di Eropa Barat. Dengan kata lain, masyarakat Eropa Barat telah terperangkap dalam sikap inkonsisten dalam penegakan semangat individualisme. Hal ini sesuatu yang memprihatinkan karena selama ini masyarakat Eropa Barat dikenal sangat menghormati hak-hak individu.

Selanjutnya, multikulturalisme juga dilindungi oleh doktrin pengakuan hak asasi manusia (HAM). Seperti diketahui bahwa salah satu unsur dari multikulturalisme adalah refleksi kehidupan beragama. Padahal, masyarakat Eropa Barat merupakan pelopor penegakan HAM di seluruh penjuru dunia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Masyarakat yang menjadi pelopor HAM, namun tanpa disadari dirinya terjebak pada sikap melanggar HAM. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, masyarakat lain di luar Eropa Barat akan mentertawakan keberadaan Eropa Barat sebagai pengawal penegakan HAM di negara lain. Dunia menyaksikan sikap kritis Eropa Barat ketika terjadi pelanggaran HAM di wilayah lain. Yang lebih menyedihkan lagi, Eropa Barat akan merosot kredibilitasnya sebagai pelopor dan pengawal HAM di dunia. Sementara itu, kekuatan pengawal penegakan HAM diperlukan oleh masyarakat internasional dalam mewujudkan tatanan sosial yang beradab dan berprinsip kemanusiaan. Jadi, pengekan Multikulturalisme di Eropa Barat sesuatu yang kontra produktif dengan keberadaannya sebagai pejuang HAM.

### **Kecemburuan Sosial Ekonomi**

Sejarah kolonialisme memberi pengaruh pada pola penyebaran imigran di Eropa Barat. Imigran umumnya pergi ke negara-negara yang pada masa lalu menjadi negara kolonial di wilayahnya, seperti misalnya orang Indonesia cenderung menjadi imigran di Belanda; orang Maroko, Aljazair, Tunisia menjadi imigran di Prancis; dan orang Mesir, India, dan Pakistan lebih suka menjadi imigran di Inggris. Walaupun demikian, ada pengecualian, yaitu imigran yang datang ke Eropa walaupun tidak memiliki kaitan dengan sejarah kolonialisme, misalnya orang Turki di Jerman atau orang Ghana di Kroasia. Jadi, secara umum aspek historis (kolonialisme) mempengaruhi negara tujuan para imigran ke Eropa Barat, namun ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu.

Kehadiran imigran ke Eropa bisa berdampak positif, namun juga bisa negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaannya bersifat komplementer. Misalnya di sektor ketenagakerjaan, para imigran menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa Barat. Hal ini terjadi ketika negara tersebut sudah tidak banyak lagi memiliki tenaga buruh. Akibatnya, para imigran tadi bisa dimanfaatkan menjadi tenaga buruh di

negara-negara Eropa Barat tersebut. Di satu sisi, para imigran membutuhkan pekerjaan, di sisi lain industri-industri ringan negara-negara Eropa tertentu membutuhkan tenaga tidak terdidik atau kaum buruh dari luar negaranya.

Namun demikian, keberadaan para imigran ini bisa berdampak negatif ketika keberadaannya bersifat kompetitif. Keberadaan para imigran menjadi bisa saingan para pencari kerja warga asli negara-negara di Eropa Barat. Para imigran yang berstatus tenaga buruh bisa menjadi saingan dari negara-negara Eropa Barat yang masih memiliki jumlah tenaga buruh yang banyak atau masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Formasi lowongan yang ada diperebutkan antara kaum imigran dan warga asli negara-negara tersebut. Kondisi persaingan ini bisa berkembang menjadi persaingan tidak sehat diantara mereka. Bahkan, hal ini bisa berkembang menjadi sikap anti imigran karena mereka dipandang menjadi ancaman untuk peluangnya mencari kerja.

Peningkatan jumlah imigran yang berprofesi pengusaha bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi negara-negara di Eropa Barat. Keberadaan pengusaha walaupun kecil ikut mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh pilar-pilar ekonomi yang besar, namun juga ditopang oleh sektor ekonomi skala kecil atau sektor riil. Misalnya, para wirausahawan Turki yang membuka restoran di Jerman mereka sedikit banyak membantu negara ini dalam pertumbuhan ekonomi negara. Keberadaan mereka sebagai pengusaha diterima oleh Pemerintah dan masyarakat negara tersebut. Tanpa keberadaan sektor riil tersebut Jerman belum tentu menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Eropa seperti sekarang ini.

Namun demikian, peningkatan jumlah imigran di Eropa Barat memang menjadi suatu persoalan sosial tersendiri jika mereka tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap. Ketiadaan pekerjaan dapat mendorong mereka terjebak pada tindakan kriminalitas. Para imigran perlu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mereka akan mengusahakannya bagaimanapun caranya. Kebutuhan dasar seperti makanan tidak bisa dikompromikan. Di samping itu, ketiadaan pekerjaan akan berdampak tidak adanya kemampuan para imigran untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang tetap, apalagi para imigran yang sudah memiliki keluarga. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi yang bersangkutan dan beban bagi pemerintah di mana imigran itu berada.

Peningkatan jumlah imigran bisa berkorelasi dengan kehidupan politik, namun juga bisa tidak terkait sama sekali. Bagi negara yang memberi ruang politik bagi para imigran, keberadaan mereka memiliki arti dalam proses politik karena sebagai warga negara yang sah memiliki hak suara dalam pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan. Mereka bahkan bisa memiliki wakilnya di parlemen seperti kasus kehidupan politik di Inggris.

Hal ini tidak harus seorang imigran yang menjadi anggota parlemen, namun seorang politisi lokal yang peduli kepada nasib para imigran dan bersedia mengartikulasikan kepentingan politik imigran bisa bertindak menjadi wakil komunitas imigran. Transaksi politik antara imigran dan politisi ini sudah merefleksikan kehidupan politik yang adil dan demokratis. Proses politik itu sudah cukup menjadi sarana perjuangan hak imigran dalam kehidupannya. Sebagai pembanding di Eropa Timur, yaitu di Kroasia, ada seorang imigran dari Afrika yang datang ke negara itu tahun 1980-an dan berhasil menjadi seorang Walikota disana. Hal ini suatu sikap politik yang mengherankan dari masyarakat di kawasan tersebut dalam kaitannya dengan eksistensi imigran. Suatu gambaran paradoks, masyarakat Eropa Barat yang terkenal dengan semangat kebebasannya sebagian masih khawatir dengan keberadaan kaum imigran, sedangkan masyarakat Eropa Timur yang sebelumnya terkenal dengan masyarakat yang berada dibawah tatanan politik otoriter (komunisme) dan tidak memiliki kebebasan justru lebih terbuka terhadap kaum imigran dalam kehidupan sosial politik. Apa dibalik paradoks ini?

Seandainya suatu negara tidak memberi ruang politik kepada para imigran, para imigran tidak memiliki payung politik. Konsekuensinya, mereka mudah diombang-ambingkan oleh berbagai konflik dan kepentingan dari aktor-aktor politik di dalam negara itu. Mereka juga tidak memiliki posisi tawar sehingga tidak diperhitungkan didalam proses politik dan pengambilan keputusan. Para imigran ini dalam wujudnya sebagai kelompok sosial ada, namun didalam proses politik dipandang tidak ada. Para imigran ini tidak memiliki hak dan kewajiban didalam kehidupan politik. Hal ini artinya, mereka juga tidak memiliki hak dan kewajiban dalam proses pengambilan keputusan. Dari sudut ini, mereka sulit untuk dikatakan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan karena hak-haknya sebagai warga negara tidak melekat dalam dirinya.

Sikap anti-imigran yang ditunjukkan oleh sebagian warga Eropa Barat sebagai akumulasi dari ketidakpuasannya terhadap peningkatan jumlah kaum imigran. Mereka merasa terganggu dengan peningkatan jumlah imigran di negaranya. Mereka memandang imigran mulai menjadi ancaman terhadap dirinya sehingga sebagian dari mereka mulai mengekspresikan sikap anti imigrannya secara terang-terangan atau terbuka. Akibatnya, isu anti-imigran mulai mencuat ke permukaan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap kaum imigran. Secara tidak langsung fenomena ini suatu gambaran dari mulai terancamnya multikulturalisme di Eropa Barat.

### **Stigma di Barat: Islam Sebagai Ancaman**

Opini publik sudah terlanjur mencitrakan bahwa tragedi teror WTC tahun 2001 terkait dengan Islam. AS mengkaitkan tragedi WTC dengan jaringan Al-

Qaeda, yaitu suatu lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang berlokasi di Afganistan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dari pemimpin organisasi tersebut yang menyebut aksinya sebagai perjuangan Islam atau "Jihad". Hal ini diperkuat lagi oleh organisasi-organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda juga melakukan aksi serupa di berbagai tempat lain. Hal ini semakin memperkuat opini publik tentang keterkaitan Islam dan teror.

Namun demikian, faktanya tidak semua umat Islam setuju dengan aksi terorisme diberbagai kawasan di dunia. Bahkan banyak umat Islam yang mengutuk aksi teror WTC tahun 2001 di berbagai tempat. Dalam pandangan mereka, aksi ini menimbulkan korban kepada individu-individu yang tidak bersalah. Suatu aksi teror bersifat acak tidak mengenal siapa yang jadi korban. Aksi teror pasca tragedi WTC berkelanjutan di berbagai kawasan di dunia, misalnya di Irak, Afganistan, Pakistan, dan Indonesia. Kesemua aksi umumnya bertujuan untuk menolak kehadiran AS dan sekutunya (Eropa Barat), walaupun terdapat juga aksi-aksi teror yang bersifat konflik sektarian. Yang pasti aksi teror itu menimbulkan korban yang tidak terkait dengan target mereka.

Sikap sebagian warga di Eropa Barat yang anti imigran karena mereka dihubungkan dengan kaum teroris. Hal ini terjadi hanya karena para imigran beragama Islam yaitu sama dengan agama yang dianut teroris. Dalam pandangan kaum imigran sikap ini tentu saja dinilai tidak adil karena mungkin saja mereka juga mengutuk aksi teror tersebut. Kasus WTC dan beberapa tempat terjadinya teror tidak bisa digeneralisir bahwa kekerasan ini merefleksikan sikap umat Islam di dunia. Dengan demikian, kaum imigran mempertanyakan alasan sesungguhnya dari sikap anti imigran dan anti Islam ini.

Solusi dari kesenjangan sikap antara sebagian warga dengan kaum imigran ini adalah perlu ada suatu jembatan komunikasi. Melalui komunikasi ini diharapkan masing-masing pihak mengetahui aspirasi dari kedua belah pihak secara langsung. Sejalan dengan hal itu, perlu lembaga atau individu yang berfungsi menjembatani posisi kedua belah pihak yang bersebarangan itu untuk mengeliminir salah paham diantara keduanya. Pihak ketiga ini bisa dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, atau individu yang terpanggil untuk menyelamatkan multikulturalisme di Eropa Barat. Meredupnya multikulturalisme tidak hanya disayangkan oleh kaum imigran di Eropa Barat sendiri, namun juga disesalkan oleh masyarakat dunia. Secara teori, multikulturalisme seharusnya tumbuh subur di bumi Eropa Barat karena merupakan bumi liberal yang seharusnya niscaya menjamin kebebasan berekspresi.

Dari sisi pemerintah, kebijakan bernada anti multikulturalisme yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara-negara di Eropa Barat tidak terlepas dari kebijakan anti teror yang dikembangkan AS. Tidak lama setelah tragedi

WTC, Presiden Bush mendeklarasikan masyarakat dunia dibagi kedalam dua kubu, yaitu "mereka" dan "kami." Mereka dihubungkan para pihak yang berhubungan dengan terorisme, sedangkan kami dihubungkan dengan koalisi atau sahabat AS. Dalam hal ini Eropa Barat merupakan sekutu AS maka suka atau tidak suka cenderung mendukung kebijakan anti teror tersebut. Hal ini seperti dikatakan di atas imigran dihubungkan dengan teror dan Islam oleh karena itu keberadaannya dibatasi ruang geraknya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan tertentu.

Beberapa Pemerintah negara di Eropa Barat secara implisit terjebak pada anti Multikulturalisme karena mendukung AS dalam perang melawan teror, padahal kaum imigran bukan kaum teroris, sehingga tidak perlu dibatasi ruang geraknya. Dengan demikian, pemerintahan tersebut juga terjebak pada sikap menggeneralisasi fenomena WTC tahun 2001, sehingga para pihak yang berhubungan dengan Islam dikategorikan ke dalam "mereka." (pendukung teroris) Dalam hal ini keberadaan "mereka" sebagai musuh yang harus diperangi. "Mereka" mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dari bentuk dan kualitas. Dari segi bentuk "mereka" adalah negara, kelompok sosial, individu yang memiliki hubungan dengan terorisme. Dari segi kualitas, "mereka" memiliki strata ancaman yaitu potensi berbahaya, berbahaya dan sangat berbahaya. "Mereka" yang berbentuk negara dan berkualitas sangat berbahaya ialah Irak dan Afganistan. Kedua negara itu dihancurkan dan pemimpin-pemimpinnya diturunkan. Sedangkan, mereka yang berbentuk individu adalah Osama bin Laden (sudah terbunuh) dan para pembantu-pembantunya. Selanjutnya, "mereka" yang berbentuk kelompok sosial antara lain Jamaah Islamiah. Organisasi yang dihubungkan dengan teror.

Media massa juga bertanggungjawab terhadap pemberitaan yang provokatif terhadap keberadaan imigran dan terorisme. Terbentuk opini publik tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Media massa disadari atau tidak ikut bertanggungjawab terhadap sikap sebagian masyarakat Eropa Barat yang anti imigran dan Islam. Dalam hal ini tentu tidak semua media massa bersikap provokatif terhadap umat Islam karena ada juga media massa yang objektif dalam pemberitaan. Namun demikian, media massa tidak sedikit yang tendensius dalam pemberitaannya sehingga merugikan umat Islam, lalu pada gilirannya berpengaruh buruk pada citra imigran. Misalnya adanya media massa Denmark yang memuat kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan disertai roket/bom. Hal ini suatu simbolisasi oleh media massa tersebut bahwa Islam identik dengan kekerasan/teror. Simbolisasi ini berdampak buruk bagi pencitraan umat Islam termasuk kaum imigran di Eropa. Jadi, targetnya imigran atau umat Islam di Eropa Barat tercitrakan sebagai penerbar kekerasan atau teror.

## Sejarah Demokrasi Inggris dan Mispersepsi terhadap Islam

Sejarah mencatat pada abad ke-13 Inggris memiliki *Magna Carta*, yaitu piagam besar yang ditandatangani oleh Raja John yang tujuannya untuk membatasi kekuasaan seorang Raja Inggris. Piagam ini sebagai buah karya dari para perjuangan konstitusi dan demokrasi. Keberadaan piagam ini dipandang sebagai pilar perjuangan demokrasi di Eropa bahkan di dunia. Ketika tatanan politik Eropa masih dikungkung oleh monarki absolut, keberadaan piagam ini dipandang sebagai pendobrak dari tatanan politik tersebut. Upaya mendeklarasikan piagam ini memerlukan keberanian dan pengorbanan raja, bangsawan, dan rakyat Inggris. Mereka telah bertindak sebagai pelopor sistem konstitusional, demokrasi, dan kebebasan.

Selanjutnya, pada abad ke-17 di Inggris kembali terjadi peristiwa yang bersejarah bagi demokrasi dan kebebasan. Saat itu terjadi peristiwa *Glorious Revolution*, yaitu suatu upaya untuk mengontrol kekuasaan raja. Nyatanya perjuangan ini berhasil dan juga menjadi tonggak sejarah perjuangan demokrasi di Inggris khususnya, di Eropa dan bahkan di dunia pada umumnya. Sekali lagi, rakyat Inggris berani membatasi kekuasaan rajanya demi perimbangan politik dan terhindar dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Upaya ini sejalan dengan ide dari pemikir politik Lord Acton yang juga berasal dari Inggris. Acton menyimpulkan bahwa kekuasaan yang absolut cenderung membawa seseorang pada perilaku korup. Acton berkesimpulan ada korelasi antara absolutisme dan korupsi. Jadi, untuk menghindari korupsi oleh penguasa absolutism perlu dieliminasi.

Dengan demikian, dua pilar demokrasi lahir di Inggris. Yang pertama adalah *Magna Carta* dan yang kedua adalah *Glorious Revolution*. Keduanya menjadi inspirasi demokratisasi di dunia karena gaungnya sampai kemana-mana. Kelahiran Amerika Serikat pada tahun 1776 bahkan berawal dari 13 koloni di New England yang menggabungkan diri menjadi konfederasi, lalu berubah menjadi federasi, juga tidak terlepas dari inspirasi pilar-pilar demokrasi tersebut dan dinamika pemikiran politik di Eropa lainnya. Oleh karena itu, munculnya sikap diskriminatif terhadap Muslim di Inggris menarik untuk dikaji karena bertolak belakang dengan citra yang dipahami oleh dunia selama ini bahwa Inggris adalah negara pelopor demokrasi dan kebebasan. Di negara ini simbol-simbol demokrasi dan kebebasan dilahirkan.

Jika berpijak pada fakta-fakta historis di atas, Inggris sudah memiliki tatanan sosial yang mengedepankan kebebasan dan demokrasi sejak dahulu kala. Mengapa tatanan sosial yang dibanggakan oleh masyarakat dan Raja-Raja Inggris itu kini dilanggar? Hal ini pasti ada yang keliru dari sikap sebagian penguasa dan masyarakat Inggris dalam memandang eksistensi kaum imigran Muslim. Seperti diketahui bahwa sektor-sektor yang dikenakan diskriminasi kepada kaum Muslim Inggris merupakan sektor-sektor yang strategis bagi kemajuan kaum Muslim. Misalnya sektor pendidikan merupakan segi yang

mendasar bagi kemajuan dan masa depan komunitas imigran. Diskriminasi di sektor ini sama saja dengan menghancurkan secara perlahan masa depan imigran Muslim tersebut. Dengan demikian, kita bisa membayangkan bagaimana keberadaan kaum Muslimin pada masa mendatang jika anak-anak dan generasi mudanya tidak memperoleh pendidikan yang memadai atau dipersulit untuk bersekolah.

Sebaliknya, para imigran Muslim akan menjadi kuat di kemudian hari jika mengenyam pendidikan yang memadai atau pendidikan tinggi. Hal ini suatu yang harus dipertaruhkan untuk merebut masa depan. Keberhasilan imigran Muslim dalam menempuh pendidikan tinggi akan menentukan prospek kejayaan mereka dikemudian hari. Di samping itu, keberhasilan mereka di sektor pendidikan akan mempengaruhi posisi tawar mereka di dalam kehidupan sosial politik karena dengan pendidikan yang tinggi kemungkinan akan membuat mereka juga sukses dalam berbagai profesi dan karir. Oleh karena itu, diskriminasi di sektor pendidikan ini sesuatu yang membahayakan bagi masa depan para imigran tersebut sehingga sedapat mungkin mereka seharusnya berjuang untuk melawannya. Seharusnya Uni Eropa dan masyarakat dunia seharusnya menolak dan mengkritik hal ini karena memperoleh pendidikan merupakan salah satu dimensi dari hak-hak azasi manusia.

Selanjutnya juga terdapat catatan bahwa saat ini masih terdapat upaya pengekangan terhadap kehidupan beragama khususnya terkait hak kaum Muslim dan Muslimah untuk melakukan ibadah. Upaya ini terjadi di kantor swasta, universitas, dan gedung penjara (Basyar, 2006: 105). Pengekangan ini bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminasi atau kebijakan anti-multikulturalisme di Inggris. Kondisi ini semakin diperburuk dengan terjadinya peristiwa teror di WTC tahun 2001 yang memberi citra buruk kepada umat Islam. Upaya pengekangan dalam beribadah bisa memancing konflik sosial yang berujung pada anarkisme. Bisa jadi, berbagai kebijakan diskriminasi tersebut terjadi karena salah persepsi terhadap ajaran hakekat Islam dan keberadaan imigran Muslim. Jika dilihat dari sejarah politiknya, Inggris negara yang peduli terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sehingga perlu telaah lebih jauh sampai mereka bersikap demikian.

Dalam konteks ini konsep persepsi dipahami sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Marliany, 2010: 188). Dengan demikian, persepsi merupakan penilaian individu atau masyarakat terhadap suatu hal yang merujuk pada berbagai peristiwa dan informasi yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Persepsi mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Persepsi positif terhadap suatu objek akan mendorong kepada sikap empati, sebaliknya persepsi negatif terhadap suatu objek akan memicu sikap

anti terhadap objek tersebut. Jadi, persepsi bisa bermuara kepada dua sikap yang satu sama lain bertolak belakang.

Jika persepsi dipahami sebagai konsep atau gagasan, maka hal itu memiliki beberapa ciri sebagai instrumen untuk menalaah berbagai fenomena. Ciri-ciri dari persepsi itu meliputi: (1) Proses pengorganisasian berbagai pengalaman; (2) Proses menghubungkan-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru; (3) Proses pemilihan informasi; (4) Proses teriosasi dan rasionalisasi; (5) Proses penafsiran dan pemaknaan pesan verbal dan non-verbal; (6) Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal; dan (7) Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu (Marliany, 2010).

Individu atau kelompok sosial bisa keliru dan bisa juga benar persepsinya terhadap suatu objek. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi persepsi individu atau kelompok sosial, yaitu objektivitas, emosi, logika, data atau informasi, dan pengalaman yang dialami terkait dengan objek yang disikapinya. Individu atau masyarakat bisa memiliki persepsi yang salah tentang objek tertentu jika tidak berhati-hati dalam memandang objek tersebut. Individu, kelompok sosial, atau masyarakat yang sudah kehilangan objektivitasnya terhadap sesuatu, maka logika atau akal sehatnya tidak lagi berperan secara benar, sebaliknya yang dominan adalah segi-segi subjektivitasnya saja. Akibatnya perilaku atau sesuatu yang datang dari objek atau kelompok sosial tertentu tertentu dicurigai dan cenderung ditolak karena dimaknai sebagai ancaman.

Interaksi politik masa lalu Inggris dan umat Islam berada dalam posisi saling berlawanan. Misalnya Inggris sebagai kekuatan politik global pada masa lalu berhasil menduduki beberapa wilayah dari imperium Islam Otoman yang meliputi wilayah Turki, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Teluk Parsi. Dengan demikian, secara psikologis keduanya dihadapkan pada warisan pola interaksi yang bersifat bermusuhan atau pola hubungan yang tidak harmonis. Umat Islam memandang Inggris sebagai pencaplok wilayah mereka, sedangkan Inggris memandang Islam sebagai mantan lawan politiknya. Psikologi konflik masa lalu kedua kelompok sosial ini tidak bisa begitu saja dilupakan. Hal ini semacam trauma politik masa lalu yang berbekas dalam kehidupan kekinian walaupun generasi sekarang tidak mengalami sendiri pertarungan politik itu. Catatan-catatan sejarah dan cerita-cerita nenek moyang mereka mempengaruhi persepsi mereka satu sama lain. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak mengherankan membangun hubungan harmonis dan saling percaya diantara keduanya bukan pekerjaan yang mudah.

Oleh karena itu, dalam Perang Dunia II, pasukan Inggris lebih banyak dibantu oleh pasukan Gurkha yang non-Muslim. Pemerintah Inggris lebih mempercayai sekutunya yang non-muslim. Dimensi masa lalu dan sekaligus

dimensi agama menentukan pihak mana yang prioritas dilibatkan dalam membantu pasukan Inggris di berbagai medan tempur dalam Perang Dunia II. Pasukan Gurkha direkrut dari Mongolia dan India yang memang memiliki keyakinan non-Islam. Dalam peperangan, pasukan Inggris umumnya lebih percaya percaya kepada pasukan Gurkha, ketimbang sekutunya dari pasukan yang beragama Islam. Pasukan yang beragama Islam biasanya berasal dari Pakistan.

Di samping itu, kesalahan persepsi ini besar kemungkinan terkait dengan dimensi arus informasi yang tidak seimbang. Opini publik sebagian masyarakat Inggris terhadap Islam dipengaruhi oleh ketidakseimbangan arus informasi. Masyarakat Inggris lebih banyak menerima arus informasi yang negatif ketimbang yang positif tentang Islam konsekuensinya mendorong kepada opini dan citra yang negatif pula. Opini negatif ini pada gilirannya menyebabkan salah persepsi terhadap Islam dan imigran Muslim. Misalnya pada kasus Salman Rusdhie warga negara Inggris keturunan India yang menulis buku berjudul *Satanic Verses*. Masyarakat khusus warga Inggris diberi informasi yang tidak benar tentang kehidupan Nabi Muhammad dimana ini dapat menimbulkan cita buruk tentang Islam. Penulis tersebut dipandang memberi informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan salah persepsi terhadap ajaran Islam.

Tulisan kontroversi itu secara tidak langsung memprovokasi konflik antara Pemerintah Inggris dengan komunitas Islam. Di satu sisi, Pemerintah Inggris berkewajiban melindungi warganya dari ancaman dari manapun datangnya. Saat itu ada ancaman pembunuhan terhadap Rusdhie dari penguasa Iran sehubungan dengan penulisan buku tersebut. Di lain pihak, masyarakat Inggris terdorong oleh sikap solidaritas sesama warga negara Inggris untuk bersikap membantu Rusdhie. Sedangkan, penguasa Iran yang mewakili umat Islam dunia mengancam membunuh Rusdhie karena dipandang telah memfitnah nabinya. Peristiwa semacam ini memberi kontribusi bagi rusaknya hubungan masyarakat Inggris dengan imigran Islam.

Disamping itu, masyarakat Inggris seperti umumnya masyarakat Barat memandang secara keliru ajaran Islam. Barat memaknai Islam sebagai agama yang memiliki ciri intervensionis, sarat dengan kekerasan, otoriter, diskriminatif, dan tidak sejalan dengan semangat gender. Akibatnya, Islam dipandang sebagai sesuatu yang mengancam peradaban Barat. Konsekuensinya Barat termasuk di dalamnya Inggris menempati posisi berlawanan atau berkonflik dengan umat Islam. Pendeknya mereka merasa saling curiga satu sama lain.

Ditambah lagi, intelektual Barat melakukan pengembangan teori atau teorisasi dan rasionalisasi secara kacau. Barat dan Islam dihadapkan atau diadudomba. Misalnya, Samuel Huntington, sosiolog Amerika yang

berpandangan bahwa seiring berakhirnya Perang Dingin pola hubungan internasional mengalami perubahan dari bipolarisme Barat melawan Timur kepada bipolarisme yang baru yaitu antara Barat melawan Islam. Hal ini diformulasikan sebagai konflik peradaban yang sempat mempengaruhi pikiran masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sejumlah akademisi sempat terpesona oleh tesis Huntington. Jadi, sebenarnya siapa penyebar benih-benih konflik atau permusuhan? Walaupun tesis Huntington hanya merupakan suatu dari refleksi pemikiran, namun dampaknya cukup serius terhadap pola hubungan Barat dan Islam. Tesis Huntington ini pula yang mendorong sebagian kaum Muslimin berperang melawan Barat yang berujung pada tragedi WTC tahun 2001. Bukankah suatu aksi berawal dari ide?

Bertitik tolak dari tesis Huntington soal konflik peradaban di atas, pertanyaannya adalah apakah kekuatan negara-negara Islam setara dengan kekuatan Uni Soviet sehingga bisa menggantikannya melawan AS? Bagaimana mungkin ketidakseimbangan kekuatan ini bisa menggantikan posisi Uni Soviet seperti waktu era Perang Dingin. Bukti ketidakseimbangan adalah aksi semauanya AS dalam menghancurkan dua negara berpenduduk mayoritas Islam yaitu Irak dan Afganistan. Seandainya terjadi keseimbangan kekuatan seperti diidentifikasi oleh Huntington, maka AS tidak akan berani memporakporandakan keberadaan dua negara tersebut. Di samping itu, dunia Islam dalam keadaan tidak bersatu jadi sulit untuk bisa bicara keseimbangan kekuatan guna mengimbangi eksistensi AS. Kalaupun dunia Islam bersatu masih diragukan apakah dapat mengimbangi negara Adidaya AS kecuali menggunakan minyak sebagai alat politik untuk melakukan tekanan melalui embargo minyak seperti tahun 1973, meski ini pun masih perlu dikaji lebih jauh efektivitasnya.

Bandingkan keseimbangan kekuatan antara AS dan Soviet dalam Perang Dingin. Selama Perang Dingin berlangsung belum pernah AS dan Uni Soviet menghindari konflik terbuka secara langsung atau perang secara langsung. Hal ini terjadi karena memang mereka seimbang secara kekuatan. Seandainya kedua negara ini terlibat perang secara langsung, mereka akan hancur keduanya. Akibatnya, baik AS maupun Uni Soviet tidak mau terlibat perang secara langsung. Ini bukti keseimbangan kekuatan atau keseimbangan teror yang memang betul-betul ada atau hadir dalam pola interaksi antara dua kekuatan.

Berdasarkan pada logika perimbangan kekuatan, konflik peradaban antara Barat melawan Islam adalah tesis yang tidak benar. Secara akademik tesis tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara logika maupun empiris. Dalam kasus Perang Afganistan dan Perang Irak dimana AS memang berhadapan dengan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Namun demikian, hal ini tidak berarti membuktikan kebenaran tesis tersebut. Hal ini seperti pengakuan Presiden Bush sendiri bahwa aksi di kedua negara ini

bukan dalam rangka perang terhadap Islam. Perang Afganistan karena reaksi tragedi WTC dan untuk melumpuhkan kekuatan Al Qaeda dan Taliban. Sementara itu, Perang Irak disebabkan dendam pribadi Presiden Bush junior terhadap pemimpin Irak yang merupakan warisan sikap permusuhan Bush senior terhadap Saddam Hussein.

Yang perlu digarisbawahi, Huntington adalah seorang sosiolog sehingga tidak punya kompetensi yang memadai untuk berbicara soal problem hubungan internasional. Wajar saja dia tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip perimbangan kekuatan, sehingga dia dengan mudah menyederhanakan pola hubungan internasional atau bipolarisme. Huntington menukar posisi Uni Soviet dengan Islam dalam konteks sistem internasional pasca-Perang Dingin. Ada kemungkinan Huntington telah terjebak pada pelacuran intelektual, yaitu dia melayani dan menyuarakan kepentingan pihak-pihak tertentu yang anti-Islam. Dia menjadi juru bicara kepentingan dari musuh-musuh Islam agar Islam masuk dalam skenario musuh Barat karena ini cara paling efektif dan efisien melumpuhkan Islam. Setelah Barat mengalahkan Timur dalam Perang Dingin, kemudian giliran Islam diposisikan berhadapan dengan Barat dengan harapan juga dapat dikalahkan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa Barat memiliki teknologi tinggi dan senjata yang sangat kuat. Keduanya merupakan elemen penting dalam sejarah perang modern.

### **Koalisi Islam-Politik di Inggris**

Karena merasa sudah tidak cocok, kelompok imigran Muslim akhirnya keluar dari Koalisi Partai Buruh di Inggris. Hal ini tentu saja sebagai upaya untuk memperoleh peluang yang lebih baik memperjuangkan aspirasi kaum imigran Muslim tersebut. Walaupun ini mungkin berat untuk dilakukan, mereka akhirnya mampu mengambil keputusan yang sulit.

Pada awalnya keberadaan imigran muslim di Inggris diwakili oleh Partai Buruh. Partai ini relatif lebih bisa menerima keberadaan imigran Muslim ketimbang Partai Konservatif. Ideologi Partai Buruh yang mengedepankan liberalisme, keterbukaan, dan kebebasan, sehingga lebih memungkinkan hidupnya multikulturalisme dan kemajemukan. Wajar jika Partai Buruh lebih menjadi pilihan dari unsur-unsur masyarakat yang termarginalkan dalam proses politik di Inggris, termasuk kaum imigran Muslim.

Namun demikian, kasus penulisan buku *Satanic Verses* oleh Rusdhie seperti tersebut di atas telah mengecewakan kaum Muslimin di Inggris. Partai Buruh tidak bersikap seperti yang diharapkan kaum Muslim (Basyar, 2006: 117). Sikap Rusdhie tersebut menyakitkan kaum Muslimin. Kecaman keras dan usulan hukuman berat diharapkan keluar dari pernyataan Partai Buruh, namun hal itu tidak terjadi, padahal Partai Buruh adalah satu-satunya kendaraan politik yang diharapkan untuk memberi tekanan politik kepada

Salman Rusdhie. Seandainya Partai Buruh yang merupakan partai berwibawa itu memberi kecaman keras kepada penulis buku itu, tentu saja dia sama halnya menerima pukulan politik yang telak. Karena yang terjadi justru Partai Buruh bersikap netral, situasi ini bisa dimaknai sebagai kekalahan imigran Muslim dan kemenangan politik Rusdhie.

Sebagai akibat dari kasus tersebut, umat Islam di Inggris akhirnya memilih untuk tidak berkoalisi dengan Partai Buruh. Partai ini dianggap sikapnya terlalu lunak dan kurang mencerminkan aspirasi kaum Muslimin dalam kasus tersebut. Partai Buruh dinilai sudah tidak lagi menjadi wadah yang tepat untuk mengartikulasikan kepentingan politik imigran Muslim Inggris. Sikap kaum imigran ini dipandang sebagai aksi politik yang penuh harga diri dan terhormat.

Kasus penulisan ini menyebabkan munculnya sebagai sikap paradoks. Di satu sisi, fenomena ini dipandang sebagai tidak lebih dari gejala biasa dari kebebasan berekspresi, sedangkan di sisi yang lain fenomena ini dipandang sebagai suatu penistaan agama di mana pelakunya harus dihukum. Kalau sudah memasuki konflik bernuansa agama atau keyakinan sulit dicarikan solusinya. Kalaupun terjadi dialog belum tentu membuahkan hasil yang diterima oleh kedua belah pihak. Masalahnya kasus ini merupakan sesuatu yang mendasar. Sebagian masyarakat Inggris merasa dirinya sebagai pelopor kebebasan, tetapi pada saat yang sama kaum Muslim merasa berkewajiban mengawal eksistensi agamanya.

Akibat kekecewaan itu, kaum muslimin mendeklarasikan "*the Muslim Manifesto*" pada tahun 1990 (Basyar, 2006). Deklarasi ini memuat dua hal penting, yaitu: (1) Strategi menghadapi masalah internal kaum Muslimin; dan (2) Strategi menghadapi keberadaan kaum muslimin di tengah-tengah non-Muslim. Strategi pertama dipahami seperti upaya untuk melakukan konsolidasi terhadap persoalan-persoalan di dalam kaum Muslimin sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kekompakan dan persatuan umat Islam di Inggris. Sedangkan strategi kedua lebih kepada pola berhubungan dengan masyarakat di luar Islam. Sikap saling menghormati tentu menjadi etika penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Inggris. Sikap untuk bersabar dan tidak mudah terprovokasi juga sesuatu yang penting bagi menjaga hubungan baik antara kaum Muslimin dengan umat yang non-Muslim.

Namun demikian, dari sisi lain keluarnya kaum Muslimin dari koalisi Partai Buruh dipandang mengurangi posisi tawarnya di dalam struktur perimbangan politik di Inggris. Sebaliknya, berkoalisinya kaum Muslim dengan Partai Buruh dinilai mendongkrak posisi tawar politiknya. Sebagian masyarakat dan pengamat menilai keputusan kaum Muslimin ini sesuatu yang mengandung unsur emosional ketimbang rasional. Dari sisi ideologis,

hal ini dipandang mencerminkan langkah politik yang konsisten dengan garis perjuangannya dan ideologi.

Keluarnya kekuatan Islam dari koalisi Partai Buruh dapat juga dipandang sebagai dinamika demokrasi. Politik selalu dinamis dan berjalan menuju arah kepentingan yang terkadang sejalan dan terkadang berbenturan di antara unsur-unsurnya atau faksi-faksinya. Pada saat itu, nampaknya Partai Buruh sengaja mengambil garis moderat dalam menyikapi kasus Salman Rusdhie. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa faksi di dalam Partai Buruh beragam dan kaum Muslimin hanyalah salah satu faksi saja. Seandainya partai ini mengambil garis keras dengan memberi kecaman atau pernyataan yang keras bagaimana dengan faksi-faksi lain yang bukan dari unsur kaum Muslimin, apalagi kaum Muslimin bukan faksi yang mayoritas dalam Partai Buruh itu. Sikap yang demikian belum tentu bisa diterima oleh faksi-faksi lain dari aliran politik non-Islam.

Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah standar ganda dalam nilai kebebasan yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat Inggris. Hal ini sebagai refleksi sikap tidak konsisten dari mereka dan sekaligus cermin dari sikap tidak objektif atau bias terhadap keberadaan kaum Muslim dan anti-Muslim di Inggris. Jadi, erdapat standar ganda dalam kehidupan sosial politik di Inggris terkait dengan isu Islam dan imigran Muslim. Khususnya dalam kasus tersebut, masyarakat Inggris menyampaikan sikap atas nama kebebasan ketika Salman Rudhie melakukan tindakan yang menyakiti hati umat Islam. Namun demikian, masyarakat Inggris tidak menyampaikan hal yang sama ketika Muslim Inggris mendapat perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial-politiknya seperti dikatakan di bagian sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, sikap konsisten masyarakat dan pemerintah Inggris dalam soal penegakan nilai kebebasan dan prinsip persamaan patut dipertanyakan. Masyarakat Inggris bersikap bias dalam menegakan nilai-nilai kebebasan di negaranya. Mereka tidak bersikap objektif dan adil dalam menyikapi kasus yang melibatkan Salman Rusdhie dan kaum Muslim, padahal keduanya mempresentasikan warga negara yang syah di Inggris. Tampaknya nilai seorang Salman Rusdhie yang keturunan India masih lebih bernilai ketimbang jutaan kaum Muslim di Inggris.

### **Catatan Penutup**

Sikap intoleransi dan diskriminasi telah mendorong mundurnya semangat multikulturalisme di Eropa Barat khususnya di Inggris. Sikap ini kontra produktif dengan dinamika dan hakekat demokrasi yang selama ini dipahami secara universal. Sikap yang mengkhianati nilai-nilai persamaan dan kebebasan yang sebelumnya dipegang secara teguh. Rotasi sikap politik yang berputar dari bandul politik yang satu kepada yang lain, dari sikap politik

primitif di era sejarah masa lalu menuju sikap rasional dan ber peradaban di era modern yang mengagungkan nilai-nilai luhur, lalu kembali kepada sikap politik primitif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Kemunduran sikap politik dalam ukuran-ukuran peradaban masyarakat sipil atau masyarakat madani ini terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, kecemburuan sosial atas kehadiran dan keberhasilan kaum imigran. Hadirnya sejumlah imigran ke Eropa berdampak positif, namun juga bisa negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaannya bersifat komplementer. Misalnya di sektor ketenagakerjaan, para imigran menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa Barat. Hal ini terjadi ketika negara tersebut sudah tidak banyak lagi memiliki tenaga buruh. Akibatnya para imigran tadi bisa dimanfaatkan menjadi tenaga buruh di negara-negara Eropa Barat tersebut. Di satu sisi para imigran membutuhkan pekerjaan, sementara di sisi lain industri-industri ringan negara-negara Eropa Barat tertentu membutuhkan tenaga tidak terdidik atau kaum buruh dari luar negaranya.

Keberadaan kaum imigran ini berdampak negatif ketika keberadaannya bersifat kompetitif. Keberadaan kaum imigran menjadi bisa saingan para pencari kerja warga asli negara-negara di Eropa Barat. Para imigran yang berstatus tenaga buruh bisa menjadi saingan dari negara-negara Eropa Barat yang masih memiliki jumlah tenaga buruh yang banyak atau masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Formasi lowongan yang ada diperebutkan antara kaum imigran dan warga asli negara-negara tersebut. Kondisi persaingan ini bisa berkembang menjadi persaingan tidak sehat diantara mereka. Fenomena persaingan tidak sehat ini antara lain bisa dimaknai dari sikap anti-imigran yang ditunjukkan oleh sebagian penduduk asli negara-negara Eropa Barat karena imigran dipandang menjadi ancaman dalam memasuki pasar kerja di negaranya.

Kedua, sikap sebagian warga di Eropa Barat yang anti-imigran Muslim karena adanya stigma teroris terhadap Islam. Hanya karena agama yang dianut oleh sebagian imigran sama dengan agama yang dianut oleh teroris yang melakukan aksi teror disekeliling tempat. Kasus teror di WTC dan aksi teror di beberapa tempat tidak boleh digeneralisir bahwa kekerasan ini mencerminkan dari sikap umat Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan kaum imigran Muslim, sikap ini tentu saja dinilai tidak adil dan semena-mena karena umumnya mereka juga mengutuk aksi teroris tersebut karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dengan demikian, kaum imigran Muslim mempertanyakan argumentasi sesungguhnya dari sikap anti-imigran dan anti-Islam ini yang belakangan ini marak melanda Eropa Barat.

Ketiga, aspek sejarah yang terlupakan mendorong terancamnya Multikulturalisme di Eropa khususnya di Inggris sebagai indikasi menurunnya sikap toleransi dalam kehidupan sosial politik. Negara dan

sebagian masyarakatnya sedang melangkah mundur dalam perlindungan hak-hak warga negara dalam kehidupan sosial politik. Eksistensinya sebagai negara pelopor nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sejak abad ke-13 yang ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* dan *the Glorious Revolution* di abad ke-17 saat ini sedang terlupakan, sehingga tak berdaya untuk memberi pencerahan pada kehidupan sosial politik di Inggris.

Keempat, mispersepsi juga berkontribusi terhadap sikap segolongan orang di Inggris yang anti-Islam. Pola hubungan masyarakat Inggris dan umat Islam dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi. Masyarakat Inggris lebih banyak menerima informasi yang bersifat negatif ketimbang yang bersifat positif tentang Islam. Hal ini menimbulkan salah persepsi masyarakat Inggris terhadap Islam. Masyarakat khusus warga Inggris memperoleh informasi yang tidak benar tentang Islam. Informasi yang keliru tentang Islam menimbulkan salah persepsi terhadap Islam yang dilabelkan sebagai simbol kekerasan, anti gender, anti HAM, dan anti demokrasi.

Perang informasi merupakan problem besar yang dialami oleh dunia Islam. Dunia Islam harus berhasil meyakinkan kepada Barat bahwa mereka selama ini telah keliru dalam memandang nilai-nilai Islam. Barat telah tercemar oleh aliran informasi dari kelompok anti-Islam sehingga keliru dalam memandang keberadaan Islam. Ajaran Islam yang memberi rahmat kepada seluruh isi alam diubah citranya menjadi Islam yang penuh dengan kekerasan dan menakutkan. Walaupun diakui di sebagian dunia Islam sekarang ini kerap terjadi aksi kekerasan, hal itu bukan sikap kaum Muslim yang merujuk pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan sabar, damai, dan toleran terhadap lawan-lawannya, namun perilaku sebagian kaum pejuang Muslim yang terbawa arus perjuangan politik yang dinamis, tegas, dan keras. Mereka meyakini perlu strategi perjuangan alternatif atau yang tidak biasa dalam menghadapi lawan-lawan yang berat. ●

## Referensi

- Breisach, Ernst. 1990. *Historiography: Ancient, Medieval, & Modern*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Noer, Deliar. 1982. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mashad, Dhurorudin. 2006. "Minoritas Muslim Prancis" dalam Afadlal (ed.). *Problematik Minoritas Muslim di Kanada dan Prancis Pasca 9/11*. Jakarta: LIPI Press.
- Hamdan Basyar. 2006. "Kebijakan Pemerintah Inggris Terhadap Minoritas Mujslim, Minoritas Muslim di Australia dan Inggris," dalam Indriana Kartini (ed.). *Minortias Muslim di Australia dan Inggris*. Jakarta: LIPI Press.
- Afadlal. 2006. "Keminoritasan Muslim Dalam Masyarakat Barat" dalam Afadlal (ed.). *Problematik Minoritas Muslim di Kanada dan Prancis*. Jakarta: LIPI Press.